

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein yang merupakan dua orang profesor psikologi. Ajzen (1991) dalam (Arianti & Azzahra, 2020, p. 160) mengemukakan bahwa sikap dan kepercayaan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu dalam menerima atau menolak suatu keputusan. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Direncanakan) ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Perilaku seseorang mempertimbangkan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka berbagai pertimbangan tersebut akan membentuk suatu perilaku. Semakin baik pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki, maka semakin baik juga perilakunya.

Dalam dunia psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah suatu teori yang terkait hubungan antara keyakinan dan perilaku. Sehingga *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka melakukan tindakan tersebut (Arianti, 2021, p. 3). Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku bersamaan dengan terbentuknya niat perilaku individu. Dalam konteks penerapan literasi keuangan, teori ini membantu kita dalam memahami mengapa dan bagaimana individu membuat suatu keputusan keuangan.

Kaitannya dengan keuangan, keyakinan dan evaluasi dalam bentuk sikap terhadap perilaku tertentu yang dapat terjadi adalah sikap terhadap pendapatan yang besar terhadap perilaku keuangan untuk mempersiapkan masa depan. Salah satu manfaat yang dirasakan individu dari sikap tersebut adalah dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal tersebut menimbulkan rasa puas kepada individu, dan

rasa puas tersebut yang menentukan sikap individu berupa suka atau tidak suka mengelola keuangan dengan terperinci. Setiap individu cenderung akan berperilaku apabila ia mendapatkan dampak yang positif untuk dirinya maupun orang lain. Sikap mengacu pada evaluasi individu terhadap pentingnya memiliki pengetahuan keuangan dan kemampuan mengelola keuangan dengan baik, dan juga berkaitan dengan kepercayaan individu terhadap manfaat yang diperoleh melalui perilaku tersebut.

Selanjutnya, norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Mengacu pada persepsi individu tentang apa yang diharapkan oleh kelompok sosial atau signifikan lainnya. Respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat setiap individu dalam melakukan suatu perilaku. Dalam konteks literasi keuangan, norma subjektif mencakup pandangan individu terhadap pentingnya mengambil sikap bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, serta norma lingkungan sosial yang mendorong individu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan mereka.

Pengendalian perilaku mengacu pada kemudahan dan kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku. Kendali perilaku mencakup sikap dan persepsi individu tentang sejauh mana mereka memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menjalankan perilaku keuangan tertentu. Misalnya, individu mungkin berpikir bahwa mereka tidak memiliki waktu, pengetahuan, atau akses ke sumber keputusan keuangan yang bijaksana. Sikap dan persepsi ini akan menghambat mereka untuk mengaktifkan perilaku keuangan yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan teori ini karena literasi keuangan digambarkan sebagai konsep pengendalian individu mengenai aspek keuangan yang mempengaruhi perilaku keuangan individu. Menurut Bhushan & Medury (2013) dalam (Arianti, 2021, p. 10), literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Literasi keuangan adalah kombinasi antara kemampuan individu, pengetahuan, sikap dan akhirnya perilaku individu yang berhubungan dengan uang. Pemahaman dan pengetahuan mengenai literasi

keuangan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan keuangan dan mengelola keuangan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif, seperti pembayaran tagihan tepat waktu, penggunaan kartu kredit yang bijaksana, dan lain-lain.

Laily (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka semakin baik pula manajemen keuangan seseorang tersebut, dan juga semakin tinggi pengetahuannya maka semakin baik pula seseorang dalam pengambilan keputusan keuangannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman literasi keuangan seseorang, maka semakin mampu seseorang tersebut mengelola dan menyusun rencana keuangan untuk masa depan.

2.1.2 Literasi Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Literasi Keuangan

Keuangan adalah salah satu aspek yang sangat penting dan melekat dalam kehidupan manusia. Literasi keuangan menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu membutuhkan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut (Selvi, 2018, p. 1) literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Untuk menghindari masalah keuangan, individu perlu memahami dan mengelola keuangan dengan bijak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021, p. 21) menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dengan literasi keuangan individu dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat agar menciptakan kehidupan yang sejahtera. Pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki individu dapat membantu individu dalam menentukan keputusan-keputusan dalam menentukan berbagai produk finansial yang dapat mengoptimalkan keuangannya (Yushita, 2017, p. 14). Individu memiliki

kemampuan untuk memahami dan mengambil keputusan yang tepat terkait dengan keuangan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman. Oleh karena itu, literasi keuangan sangat penting bagi individu untuk memahami risiko dan manfaat dari setiap keputusan keuangan yang diambil. Dengan pengetahuan keuangan diharapkan individu tidak salah dalam membuat keputusan dalam keuangan kedepannya.

Sejalan dengan pendapat menurut (Kristanto & Gusaptono, 2021, p. 14) literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Pemahaman individu terhadap pengetahuan keuangan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan keputusan keuangan yang disebabkan oleh *human error* sehingga memberikan keuntungan yang lebih memberikan nilai lebih bagi individu itu sendiri (Erryandaru, 2018, p. 1).

Lisa Xu dan Bilal Zia (2012) dalam (Agusta, 2016, p. 15) mengatakan bahwa istilah literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan seperti kemampuan untuk pengelolaan uang dan perencanaan keuangan. Dalam literasi keuangan, individu perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip keuangan yang baik seperti pengelolaan utang, investasi, dan perencanaan keuangan. Selain itu, literasi keuangan juga meliputi pengenalan konsep-konsep finansial seperti inflasi, suku bunga, dan risiko investasi. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, individu dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Individu yang memiliki pemahaman pada literasi keuangan akan mampu untuk memahami dan mengelola keuangan secara bijak, sehingga akan meminimalisir kerugian-kerugian pada keuangannya.

Menurut Bhushan dan Medury (2013) dalam (Chairil & Niangsih, 2020, p. 71) literasi keuangan sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, konsumen yang memiliki literasi keuangan dapat melalui masa-masa keuangan yang sulit karena faktanya bahwa mereka mungkin memiliki akumulasi tabungan, membeli

asuransi dan diversifikasi investasi mereka. Kedua, literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif, seperti pembayaran tagihan tepat waktu, angsuran pinjaman, tabungan sebelum habis, dan menggunakan kartu kredit dengan bijak. Maka dari itu, individu perlu dilatih untuk mengembangkan kecakapan hidup salah satunya pada pemahaman dan keterampilan keuangan, sehingga individu tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan. Individu juga perlu dilatih untuk memiliki sikap kreatif, mandiri, dan berpikir kritis dalam mengambil keputusan keuangan. Literasi keuangan memiliki dimensi tambahan, dimana seseorang diharuskan memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk membuat keputusan finansial dengan memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki (Rahmawati, 2016, p. 5).

Maka dapat disimpulkan bahwa Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik, termasuk mengerti dan memahami konsep dasar keuangan seperti pengelolaan penghasilan, pengambilan keputusan investasi, pembayaran hutang, pengelolaan anggaran, dan pemahaman tentang produk keuangan seperti kartu kredit dan asuransi. Literasi keuangan merupakan hal yang penting dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang tentunya tidak terlepas dari sesuatu yang menyangkut keuangan. Individu perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik seperti pengelolaan utang, investasi, dan perencanaan keuangan agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Dengan memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik, individu dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien agar menghasilkan manfaat dan tujuan jangka panjang bagi kehidupan.

2.1.2.2 Aspek-Aspek Literasi Keuangan

Nababan & Sadalia (2013, p. 4) menyatakan bahwa dalam literasi keuangan terdapat beberapa aspek yang meliputi:

1) *Basic Personal Finance*

Menurut Rasyid (2012) dalam (Chairil & Niangsih, 2020, p. 71) pengetahuan dasar keuangan adalah pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum. Mencakup berbagai pemahaman dasar individu dalam suatu sistem keuangan seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, opportunity cost, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain-lain. Adapun Asshiddiqie (2018, p. 41) menyebutkan pengetahuan umum keuangan pribadi terdiri dari, likuiditas suatu aset, manfaat pengetahuan keuangan pribadi, pengetahuan tentang aset bersih, pengetahuan tentang pemasukan dan pengeluaran uang, dan pengetahuan tentang perencanaan keuangan pribadi.

2) *Cash Management*

Manajemen keuangan didefinisikan sebagai proses perencanaan, analisa, dan pengendalian kegiatan keuangan. Bentuk aplikasi dari manajemen keuangan adalah manajemen keuangan pribadi, meliputi manajemen keuangan, pengeluaran dan kredit, serta simpanan dan investasi (Chairil & Niangsih, 2020, p. 71). Pengelolaan uang mempelajari bagaimana seseorang mengelola uang pribadi mereka. Semakin banyak pengalaman mengenai literasi finansial maka semakin baik pula individu tersebut mengelola uang pribadi mereka.

Menurut Selvi (2018, p. 32) manajemen keuangan mencakup bagaimana seseorang mengelola uang yang dimilikinya dan juga kemampuan dalam menganalisis sumber pendapatan pribadinya. Selain itu, manajemen uang jika terkait dengan bagaimana seseorang membuat prioritas penggunaan dana serta membuat anggaran. Perry dan Morris (2005) dalam (Trisuci, 2023, p. 184) menyatakan indikator pengelolaan keuangan, yaitu: penyusunan rancangan keuangan untuk masa depan, pembayaran tagihan tepat waktu, penyesihan uang untuk tabungan, pengendalian biaya pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga.

3) *Credit and debt management*

Manajemen kredit merupakan proses kegiatan yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Sedangkan manajemen hutang adalah proses

pembayaran utang dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu untuk peminjaman utang.

Seseorang bisa saja mengalami kekurangan dana, sehingga harus memanfaatkan kredit ataupun utang. Kebutuhan dan tuntutan hidup yang semakin tinggi mengakibatkan semua pengeluaran dapat dibiayai dengan pendapatan, seperti rumah dan kendaraan, dan juga biaya pendidikan. Sehingga menggunakan kredit ataupun utang dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi hal tersebut. Dengan sumber dana kredit ataupun utang, seseorang dapat mengkonsumsi barang dan jasa pada saat ini, dan membayarnya di masa mendatang. Pengetahuan mengenai manajemen kredit dan utang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, pertimbangan dalam melakukan pinjaman, karakteristik kredit konsumen, tingkat bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, sumber utang atau pun kredit dan lain lain sangat dibutuhkan agar dapat menggunakan kredit dan utang secara bijaksana (Selvi, 2018, p. 33).

4) *Saving and Investment*

Tabungan merupakan bagian dari penghasilan seseorang yang tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan dialokasikan untuk menjadi simpanan. Menurut Asshiddiqie (2018, p. 29) dalam pemilihan tabungan terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu: tingkat pengembalian (persentase kenaikan tabungan), inflasi, pertimbangan-pertimbangan pajak, likuiditas, keamanan (proteksi terhadap tabungan jika bank mengalami kesulitan keuangan), dan pembatasan-pembatasan serta pembebanan fee atas suatu transaksi tertentu untuk penarikan deposito. Adapun indikator tabungan, yaitu: karakteristik deposito, dan pengetahuan tentang manfaat menabung.

Sedangkan investasi merupakan pengetahuan individu tentang menggunakan keuangan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih di masa mendatang yang berkaitan dengan pasar modal, reksa dana, deposito suku bunga, dan lain sebagainya. Investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Terdapat banyak instrumen investasi yang dapat dipilih, baik pada aset riil seperti tanah, properti, emas, maupun aset keuangan seperti

saham, obligasi, sertifikat deposito, dan reksadana. Adapun indikator dari investasi, yaitu: Pengetahuan tentang jenis investasi, pengetahuan tentang investasi jangka panjang, dan pengetahuan tentang risiko investasi (Asshiddiqie, 2018, p. 42).

5) *Risk management*

Risiko adalah segala kemungkinan yang dapat ditemui atau dihadapi oleh individu. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menghadapi penanggulangan risiko, terlebih risiko yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga dan masyarakat. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dihadapi atau mengoptimalkan keuntungan yang ada (Djojosoedarso, 2003: 4 dalam Noviani, 2021, p. 17).

Otoritas Jasa Keuangan (2022) menyebutkan untuk meminimalisir kerugian, individu dapat memanfaatkan produk asuransi dan memiliki dana darurat. Asuransi adalah konsep penglihatan dan pengelolaan risiko dari nasabah ke perusahaan asuransi dengan cara membayar premi kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi (Erryandaru, 2018, p. 4). Asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada seluruh peserta asuransi. Adapun indikator dari manajemen risiko, yaitu: pengetahuan umum tentang asuransi, pengetahuan tentang jenis asuransi, pengetahuan tentang risiko asuransi, pengetahuan tentang manfaat asuransi, dan pengetahuan mengenai dana darurat.

2.1.2.3 Tingkat Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014) tingkat literasi keuangan individu dapat dibedakan menjadi empat jenis tingkat, yaitu:

- 1) *Well Literate*. Pada tingkat ini, individu memiliki pengetahuan serta keyakinan tentang lembaga jasa keuangan. Termasuk memiliki pengetahuan tentang fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan dengan baik. Individu tersebut juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Sehingga mampu membuat individu tersebut menjadi lebih sejahtera.
- 2) *Suff Literate*. Pada tingkat ini, individu memiliki pengetahuan serta keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk

mengenal fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- 3) *Less Literate*. Pada tingkat ini, individu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Akan tetapi, mereka belum mengetahui bagaimana caranya mengelola dan menggunakan produk serta jasa keuangan dengan baik.
- 4) *Not Literate*. Pada tingkat ini, individu belum cukup memiliki pengetahuan serta keyakinan terhadap produk, jasa, maupun lembaga keuangan, serta belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola keuangan pribadinya.

Adapun menurut Chen and Volpe (1998) dalam (Akmal & Saputra, 2017, p. 240) mengkategorikan literasi keuangan personal menjadi 3 kelompok, yaitu: 1) <60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah; 2) 60%-79% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah; 3) >80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi.

2.1.2.4 Manfaat Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kebutuhan dasar bagi setiap individu agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat terjadi apabila ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Kesulitan keuangan juga dapat menyebabkan stress dan rendahnya kepercayaan diri. Tentunya dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai literasi keuangan merupakan hal yang paling penting karena akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Menurut (Arianti, 2021, p. 10) pengetahuan mengenai keuangan sangat penting bagi individu, agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan keuangan mereka. Kurangnya pengetahuan mengenai keuangan akan mengakibatkan kerugian bagi individu.

Menurut PISA (2012) dalam (Rahmawati, 2016, p. 6), manfaat dari literasi keuangan adalah sebagai berikut.

- 1) Literasi keuangan menjadikan individu dewasa lebih mampu dalam menabung dan membuat perencanaan untuk masa pensiun mereka. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan pada individu akan membawa perubahan positif pada perilakunya.

- 2) Dengan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, maka individu akan lebih mampu mengatur keuangannya.
- 3) Tingkat literasi keuangan yang tinggi berhubungan tidak hanya dengan peningkatan jumlah aset namun juga pada hutang dan manajemen utang. Dengan literasi keuangan yang lebih tinggi individu akan memilih utang hipotik dengan biaya yang lebih murah dan menghindari pembayaran bunga yang tinggi serta biaya tambahan.
- 4) Literasi keuangan juga mempunyai peran penting dalam perekonomian dan stabilitas keuangan. Masyarakat yang berliterasi secara finansial dapat membuat keputusan yang tepat dan menuntut kualitas layanan keuangan yang lebih baik

2.1.3 Program Pemagangan Jepang

2.1.2.1 Pengertian Pemagangan

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Yang dimaksud pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Upaya pembinaan tenaga kerja dapat ditempuh melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan, seperti pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan kerja.

Simamora dalam (Kamil, 2012, p. 71) menjelaskan bahwa magang adalah suatu model pembelajaran yang menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan di tempat tertentu untuk subjek

tertentu. Adapun menurut (Darmawan, 2017, p. 153) magang merupakan proses pembelajaran yang mengandung unsur “belajar sambil bekerja” (*learning by doing*), dimana warga belajar (pemagang) akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar, fasilitator belajar.

Program pemagangan adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja dan pelatihan kepada peserta magang dalam bidang tertentu, sebagai persiapan mereka memasuki dunia kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi peserta magang untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman praktis dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, serta mempelajari aspek-aspek lain dari industri atau organisasi yang relevan dengan bidang mereka. Program pemagangan bertujuan untuk membantu peserta magang memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, serta membantu mereka memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang industri atau bidang tertentu.

Hakikat pemagangan yang dikemukakan oleh Disnakertrans Jabar (2023) Jabar adalah sebagai berikut.

- 1) Pemagangan merupakan sub sistem pelatihan kerja, dalam rangka pembinaan sumber daya manusia.
- 2) Pemagangan dilakukan melalui jalur alih pengalaman di tempat kerja.
- 3) Pemagangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten bagi pasar kerja.
- 4) Pemagangan diselenggarakan di bawah bimbingan karyawan senior (instruktur).
- 5) Antara peserta dan penyelenggara (perusahaan/instansi) terikat suatu kontrak/ perjanjian pemagangan.
- 6) Program pemagangan disusun berdasarkan standar kualifikasi keterampilan atau kebutuhan.
- 7) Pemagangan merupakan cara efektif dan efisien untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.
- 8) Diharapkan mampu berperan aktif di dunia usaha.

Adapun program pemagangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a) mengutamakan manfaat pengalaman kerja di tempat kerja nyata;
- b) langsung terkait/ berhubungan dengan kebutuhan tenaga kerja;
- c) peserta diseleksi

berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan; d) dilaksanakan berdasarkan kontrak/ perjanjian pemagangan; e) dilaksanakan sesuai durasi waktu dan program yang telah dirancang; f) peserta dimungkinkan memperoleh imbalan jasa/ tunjangan magang/ uang saku; g) pemagang memperoleh keterampilan dan kompetensi melalui ahli keterampilan dan kompetensi dari karyawan senior/ ahli; h) peserta yang lulus diberikan sertifikat pemagangan.

Pemagangan merupakan model pembelajaran non formal yang sering dilakukan dan identik dengan proses belajar sambil bekerja. Melalui magang, diharapkan individu dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Tujuan magang berkaitan dengan optimalisasi diri peserta didik dalam memperoleh keterampilan bekerja serta memantapkan kualitas keterampilan yang telah diperoleh ketika berada di pelatihan.

Pemagangan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Terdapat beberapa program pemagangan ke luar negeri di Indonesia. Selanjutnya secara spesifik pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008, dijelaskan bahwa pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Adapun penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari:

- 1) LPK swasta. LPK swasta hanya dapat menyelenggarakan pemagangan untuk masyarakat umum.
- 2) Perusahaan. Perusahaan hanya dapat menyelenggarakan pemagangan untuk pekerjanya.
- 3) Instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah instansi yang menyelenggarakan pemagangan untuk masyarakat umum.
- 4) Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan untuk siswa/ mahasiswa.

2.1.2.2 Gambaran Umum Program Pemagangan Jepang

Di Indonesia, program pemagangan ke luar negeri yang selama ini dilakukan secara tertib dan telah berjalan secara terus menerus adalah program pemagangan ke Jepang. Jepang merupakan negara yang maju dalam perkembangan teknologinya serta memiliki banyak kelebihan di bidang sumber daya manusianya (Fadilah, 2019, p. 47). Sehingga banyak warga negara dari luar Jepang yang tertarik untuk menimba ilmu dari keberhasilan Jepang. Untuk melaksanakannya dapat dilakukan dengan mengikuti program pemagangan Jepang, sehingga dapat belajar sambil bekerja disana. Adapun program pemagangan Jepang bermula sejak tahun 1990 an, dijelaskan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Nawawi (2010) dalam (Fadilah, 2019, p. 47), yaitu “dikarenakan motivasi untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, banyak orang dari Indonesia yang ingin berangkat ke Jepang pada tahun 1990 an, bukan untuk keperluan kunjungan akan tetapi mereka berada di bawah program yang bernama *Industrial Training and Technical Intenrship Program*: yang bertujuan untuk menimba ilmu dan keterampilan tentang teknis pekerjaan di Jepang”.

Menurut (Thamrin, 2014, p. 9) program pemagangan ke Jepang merupakan keseluruhan isi pelatihan kerja yang tersusun secara sistematis yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Jepang oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Program pemagangan Jepang bertujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja para peserta pelatihan, serta memfasilitasi pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. Selama program pemagangan, peserta akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan di Jepang untuk belajar tentang teknologi dan praktik-praktik kerja yang canggih dan modern. Biasanya, program pemagangan Jepang berlangsung selama satu hingga tiga tahun, tergantung pada jenis pekerjaannya. Selama masa pelatihan, peserta akan menerima tunjangan bulanan dari perusahaan, serta diatur oleh peraturan kerja yang ketat.

Program pemagangan ke Jepang merupakan wujud kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan IM Japan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia (Solechan, 2018, p. 327). Program pemagangan Jepang yang disebut program IM *Japan* diselenggarakan oleh Dinsosnakertrans provinsi di seluruh Indonesia. Program IM *Japan* sudah dilakukan sejak tahun 1993. Pada awalnya program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kerja dan Transmigrasi Indonesia dengan *International Man Power Development Organization Japan* yang (IM *Japan*). IM *Japan* adalah asosiasi pengusaha kecil dan menengah yang menerima pemegang dari luar Jepang, khususnya Indonesia. IM *Japan* juga merupakan sponsor dan pelindung pemegang selama berada di Jepang.

Selain melalui IM *Japan*, program pemagangan Jepang juga dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang sudah mendapat izin dari Kementerian Tenaga Kerja RI Bidang Lattas Pemagangan dan Organisasi Penerima (*Accepting Organization*) di Jepang. Perusahaan atau LPKS yang dapat mengirimkan pemegang ke Jepang biasa disebut dengan *Sending Organizing* (SO). Di Indonesia, terdapat kurang lebih 300 (tiga ratus) Lembaga Pelatihan Kerja *Sending Organizing* (SO) yang memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bahasa dan budaya Jepang untuk kemudian mengirimkan peserta pelatihan ke Jepang sebagai pemegang (*Trainee*).

Program pemagangan Jepang dilaksanakan dengan durasi waktu yang bervariasi, tergantung pihak perusahaan penerima di Jepang. Ada yang melaksanakan pemagangan selama 3 (tiga) tahun dan ada yang dapat diperpanjang sampai 5 (lima) tahun. Adapun pemagangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1) Program pemagangan bulan pertama di Jepang disebut masa *training* atau masa *konshusei*, yang berarti masa berlatih sambil bekerja. Peserta masih berlatih penyesuaian di training center.
- 2) Bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-12, akan dievaluasi kompetensinya, dan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, peserta harus lulus ujian yang diadakan pada akhir tahun pertama.

- 3) Program pemagangan bulan kedua sampai dengan tahun ketiga disebut *technical intern training* atau disebut juga masa *jisshusei* yang berarti praktek kerja. Pada masa ini peserta sudah dilindungi oleh undang-undang perburuhan di Jepang, dan sudah diperbolehkan lembur.
- 4) Program pemagangan dapat diperpanjang menjadi 5 tahun, apabila perusahaan dan peserta sepakat untuk memperpanjang masa praktek kerja.

Terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh peserta pemagangan, yaitu pengalaman kerja yang bisa memberi ilmu bermanfaat, kemudian selama magang semua fasilitas dipenuhi, uang saku dengan nominal \pm 18-25 juta per bulan sebelum ditambah lemburan, sertifikat JITCO (*Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization*), dan pencairan asuransi setelah pulang, nominalnya sekitar 20-50 juta. Selain itu, terdapat fasilitas yang bisa diterima oleh peserta magang dari perusahaan, seperti asuransi kesehatan, dan apartemen yang sudah memiliki fasilitas alat-alat rumah tangga termasuk gas, listrik, air, dan lain sebagainya. Sehingga peserta magang tidak perlu membayar uang sewa tempat tinggal yang terlalu tinggi, karena sudah difasilitasi oleh perusahaan tempat mereka melaksanakan magang.

2.1.4 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

2.1.3.1 Pengertian Lembaga Pelatihan Kerja

Lembaga Pelatihan merupakan salah satu satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pelatihan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keterampilan atau keahlian, pengetahuan, dan kecakapan hidup tertentu. Kamil (2010) dalam (Widianto, 2018, p. 45) mendefinisikan pelatihan sebagai pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan tertentu yang berjangka pendek dan diakhir pelatihan akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Program pelatihan di lembaga pelatihan juga merupakan suatu dalam proses mengisi kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang dengan tuntutan pekerjaannya (Nuraeni, 2019, p. 1). Lembaga pelatihan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan masa yang lebih pendek dibandingkan dari pendidikan formal.

Lembaga pelatihan adalah lembaga pendidikan yang juga berfungsi untuk menambah, melengkapi, dan mengganti pendidikan formal dalam bentuk yang singkat dan berfokus pada peningkatan kompetensi keterampilan bidang tertentu. Dengan begitu, masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal, maka dapat mengikuti pendidikan non formal yang setara pendidikan formal. Lembaga pelatihan dapat menjadi tempat untuk mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki individu namun belum didapatkan di pendidikan formal.

Pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya dijelaskan pada ayat (5) bahwa: “Kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga kursus dan pelatihan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keterampilan atau keahlian, pengetahuan, dan kecakapan hidup tertentu. Dilanjutkan dengan Pasal 26 Ayat (5) yang menjelaskan bahwa kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menekankan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Lembaga pelatihan dapat berbentuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dijelaskan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pelatihan kerja. Selanjutnya pada Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja disebutkan bahwa pelatihan kerja dapat dilaksanakan oleh LPK Swasta, LPK Pemerintahan atau LPK Perusahaan. LPK Swasta merupakan lembaga penyelenggara pelatihan kerja bagi masyarakat umum

dan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/ kota. Lembaga pelatihan swasta merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pelatihan secara mandiri atau tata kelolanya berdiri sendiri dikelola oleh pemilik lembaga pelatihan. Sedangkan LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan adalah lembaga penyelenggara pelatihan kerja dan wajib mendaftar pada dinas kabupaten/ kota. Lembaga pelatihan pemerintah merupakan lembaga penyelenggara program pelatihan yang dikelola oleh pemerintah. LPK merupakan salah satu lembaga pelatihan yang dibina oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker).

2.1.3.2 Peran Lembaga Pelatihan Kerja dalam Program Pemagangan Jepang

Lembaga Pelatihan Kerja memiliki peran sebagai lembaga pengirim peserta magang. LPK juga berperan menjadi pendamping peserta magang ketika mereka diberangkatkan. Selain itu, LPK juga bertugas untuk memberikan pelatihan pra-magang sebagai bekal calon peserta magang sebelum diberangkatkan ke Jepang. Meskipun hanya berstatus magang, tetap saja peserta yang mengikuti pemagangan Jepang harus memiliki bekal keterampilan berbahasa Jepang, dasar-dasar SOP, *hard skills* dan *soft skills*. *Hard skill* adalah kemampuan dan keterampilan bekerja, sedangkan *soft skill* adalah sikap mental yang baik.

Adapun peran LPK dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang menurut (Suyono, 2017, p. 79) adalah sebagai berikut:

- 1) LPK berperan merekrut peserta didik/ pelatihan sesuai dengan persyaratan khusus yang sudah ditetapkan.
- 2) Memberikan pendidikan sikap dan belajar bahasa Jepang. Proses belajar merupakan proses menyampaikan materi dari pendidik kepada peserta didik agar mampu memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Di LPK-SO pembelajaran yang dilaksanakan adalah mengenai pendidikan bahasa Jepang dan persiapan seleksi. Tentunya pada program pemagangan Jepang sangat dibutuhkan kemampuan berbahasa Jepang. Tingkat kriteria minimal yang biasanya harus dipenuhi oleh peserta pemagangan Jepang adalah *Japanese Language Proficiency Test (JLPT)* tingkat N4 dan tingkat N5.

- 3) Menyusun kelengkapan berkas dan data. Calon peserta pemagangan Jepang harus dapat menyusun kelengkapan berkas agar syarat kelengkapan data dapat terpenuhi. Berkas yang sangat diperlukan oleh calon peserta pemagangan Jepang adalah data identitas calon pemagang, seperti KTP, Ijazah, KK, Akte Kelahiran, SKCK, dan lain sebagainya.
- 4) Pelatihan fisik dan mental peserta pemagangan. Pelatihan fisik dan mental peserta pemagangan sangat diperlukan untuk persiapan pemagang menghadapi seleksi fisik.
- 5) Memberikan pembelajaran sikap disiplin. Pengenalan sikap disiplin perlu selalu diterapkan agar peserta pemagangan dapat terbiasa pada suasana disiplin di Jepang saat melaksanakan pemagangan di Jepang.
- 6) Memberikan pengajaran mengenai teknik wawancara untuk menghadapi rangkaian seleksi. Pelatihan kerja berada pada bimbingan dan pengawasan instruktur yang berpengalaman, oleh karena itu LPK-SO harus memiliki instruktur yang berpengalaman pada pemagangan Jepang dan dunia kerja di Jepang. Sehingga peserta pemagangan mendapatkan pengajaran mengenai teknik wawancara dan siap menghadapi rangkaian seleksi pemagangan.
- 7) Meningkatkan kemampuan teknik matematika. Pembelajaran mengenai teknik matematika perlu diberikan kepada calon peserta pemagangan sebagai salah satu syarat seleksi pemagangan Jepang. Selain itu, matematika dapat berfungsi untuk memperhitungkan waktu untuk melatih kedisiplinan, untuk menghitung pendapatan, mengelola keuangan pribadi, melakukan perencanaan keuangan mandiri, dan lain sebagainya.
- 8) Mendampingi, memotivasi, dan memberkahi peserta. LPK mendampingi calon peserta pemagangan mulai dari saat seleksi wawancara sampai dengan pemberangkatan. Pihak LPK perlu memberikan motivasi-motivasi kepada calon peserta pemagangan untuk mempertahankan mental dan semangat calon pemagang. Pembekalan orientasi tentang gambaran setelah pulang dari Jepang (paska magang) perlu diberikan kepada calon peserta agar siap untuk berwirausaha yang dapat diberikan melalui narasumber dari alumni LPK yang sudah sukses dibidangnya. Dengan harapan setelah kepulangan ke Indonesia

dapat menambah wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk menekan tingkat pengangguran yang terjadi.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang kurang lebih memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah:

2.2.1 “Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemegang ke Jepang”, oleh Ahmad Eko Saputro, dan Widi Hastomo (2020). Penelitian tersebut merupakan sebuah program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para calon pemegang Jepang mengenai literasi keuangan melalui perencanaan keuangan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa perencanaan keuangan sangat penting untuk para calon pemegang Jepang. Jika tidak dilakukan perencanaan keuangan dengan baik maka uang yang didapat di Jepang akan habis begitu saja. Alhasil, kehidupan akan kembali dari nol dan menjadi pengangguran. Padahal, dengan adanya program pemagangan ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan. Adapun metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode eksperimen. Ditemukan bahwa setelah mengikuti edukasi mengenai literasi keuangan, peserta magang ke Jepang memahami pengisian kertas kerja perencanaan keuangan, dan rata-rata peserta magang telah sadar untuk tidak menghambur-hamburkan uang dan menjauhi sikap hedonisme (Saputro & Hastomo, 2020).

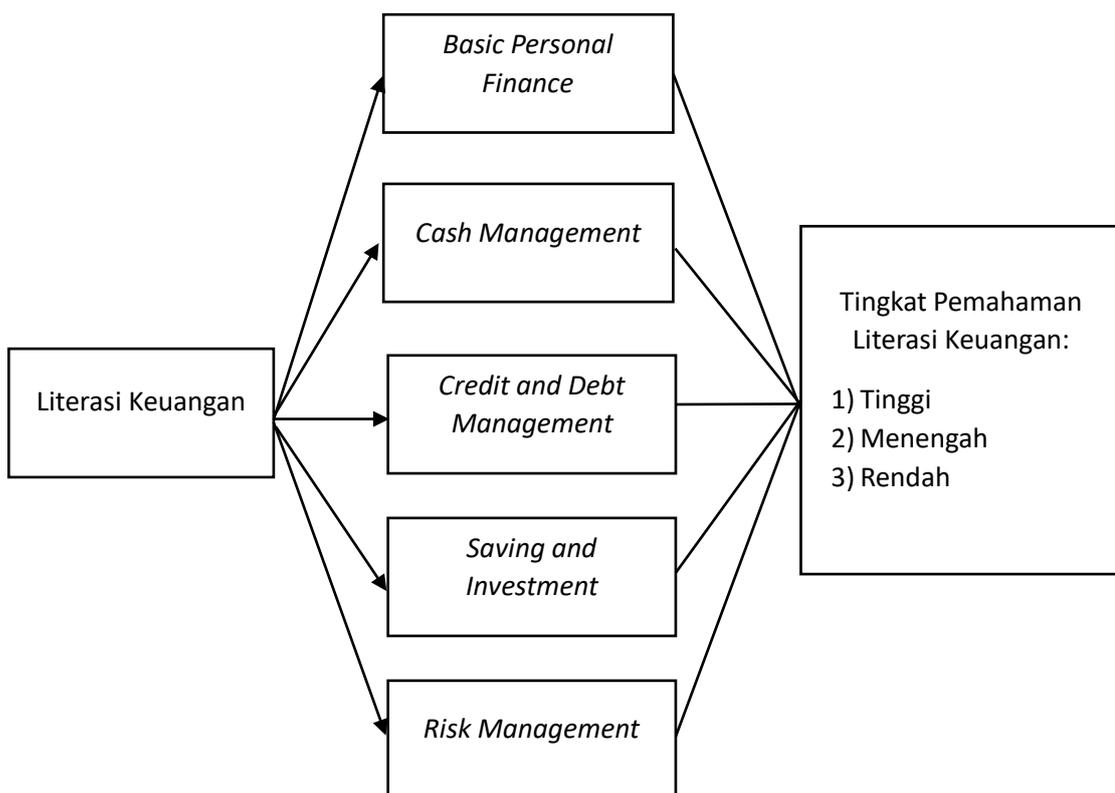
2.2.2 “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi”, oleh Amanita Novi Yushita (2017). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa pentingnya literasi keuangan bagi individu bukan sekedar sebagai ilmu pengetahuan ataupun teori saja, tetapi diharapkan dapat membuat individu lebih bijaksana dan pandai dalam mengelola aset yang dimilikinya sehingga dapat memberikan timbal-balik yang bermanfaat dalam menyokong keuangan individu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Yushita, 2017).

- 2.2.3 “Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi”, oleh Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi (2015). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian survei. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, maksimum dan minimum (Margareta & Pambudhi, 2015).
- 2.2.4 “Manajemen Pembelajaran Pelatihan Persiapan Program Magang”, oleh Arif Aji Fadilah, dan F. Fakhrudin (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembelajaran pada persiapan program magang ke Jepang di LPK Wakashio Gakkou yang merupakan Lembaga Pelatihan Kerja *Sending Organizing* (LPK-SO) yang ada di Batang, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan dilakukan secara intensif dengan penggunaan asrama sebagai tempat tinggal wajib peserta, pembinaan dilakukan berkaitan dengan aspek sikap/kedisiplinan peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Peserta merasa puas dengan kegiatan pelatihan yang diberikan karena mendapatkan ilmu di bidang bahasa Jepang, keterampilan kerja, fisik dan kedisiplinan yang berguna sebagai bekal untuk magang ke Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Fadilah, 2019)
- 2.2.5 “*Indonesian Skilled Labor for Japan Labor Market seen as Rational Choice*”, yang artinya “Tenaga Kerja Terampil Indonesia untuk Pasar Tenaga Kerja Jepang dipandang sebagai pilihan yang rasional”, oleh Herjanti Nursuksmaningtyas Santoso, dan Kurniawaty Iskandar (2021). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis mengenai motivasi mahasiswa lulusan Bahasa Jepang dalam mengikuti program pemagangan dan apa implikasi karir mereka setelah kembali ke Indonesia. Ditemukan bahwa mahasiswa lulusan bahasa Jepang mempertimbangkan untuk menjadi peserta pemagangan karena mereka ingin memperoleh keterampilan yang mungkin mereka dapatkan dengan mengikuti program magang dan keuntungan setelah

mereka kembali akan sangat besar sebagai tenaga kerja. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak terampil untuk memperoleh keterampilan bahasa Jepang dan pengalaman hidup di Jepang sebagai modal utama untuk masuk kembali ke lapangan kerja Indonesia dan mendapatkan kesempatan kerja serta kehidupan yang lebih baik. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Santoso & Iskandar, 2021).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis, yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut (Sugiyono, 2020, p. 328). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman literasi keuangan calon peserta pemagangan Jepang di LPK Bahasa Jepang di Kota Tasikmalaya. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian